



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : [www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id)

Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

PP. DIAS SUROYO,SH.,MH;

## RELAAS PANGGILAN SIDANG

No. 770 / Pdt.G/ 2021 / PN. Sby.

Pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021,  
saya : **HERRY ARIFANTO, SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas  
perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

### TELAH MEMANGGIL KEPADA :

#### **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA,**

berkedudukan hukum di Jl. Taman Surya No. 1 , Kota Surabaya, yang dalam perkara ini di wakili  
oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya pada Pemerintahan Kotamadya Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT;**

Supaya ia/mereka datang menghadap di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya  
bertempat di Jl. Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, pada :

HARI : Rabu  
TANGGAL : 1 September 2021  
J A M : 09.00 W.I.B

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Reg.  
No. 770/Pdt.G/2021/PN.Sby. Antara :

**SALEH ALHASNI,Dkk (11 Penggugat)**

Kesemuanya ahli waris Alm. Abdullah Bin Umar Alhasni.....sebagai....**PARA PENGGUGAT;**  
MELAWAN :

**PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero);.....sebagai.....TERGUGAT;**  
Dan

**PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA; ;.....sebagai.....TURUT TERGUGAT;**

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan dialamat tersebut diatas sambil  
meninggalkan turunan relaas panggilan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Saudara kostadjji selaku staf

#### PENERIMA

kostadjji  
13.08.21



# LAW OFFICE SARAH AND PARTNERS

Dusun Jatimbo, Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto

Alamat Website : <http://lawofficesarahandpartners.page.tl>

E-mail : [law.office.s.and.p@gmail.com](mailto:law.office.s.and.p@gmail.com), Hp/Wa : 082246680196

Dicetak Melalui SIPP PN Sby 2021 Pdt.G 770 petitum.docx

Kepada Yth.

**Bpk/Ibu. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  
Pada Pengadilan Negeri Surabaya.**

Di  
Jl. Arjuno No.19  
Kota Surabaya

Perihal : **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Saleh Alhasni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bendulmerisi Permai D/19, RT/RW: 001/009, Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;**
2. **Achmad Abdullah Alhasni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kalimas Madya 2/9, RT/RW: 001/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;**
3. **Djafar Hasny**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat XI/8, RT/RW: 003/004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;**
4. **Mohammad**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan K.H.M. Mansyur 175, RT/RW: 001/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;**
5. **Salma Alhasni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kalimas Madya 3/14, RT/RW: 002/006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;**
6. **Aminah Bt Abdullah A**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ampel Melati I/50, RT/RW: 005/004, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;**

## LAW OFFICE SARAH AND PARTNERS

---

7. **Soud Abdullah Alhasni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mertodranan RT/RW: 001/002, Keurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;**
8. **Aisyah Abdullah Alhasni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukodono 4/79, RT/RW: 005/015, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;**
9. **Syarif Abid**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Beringin No. 12, RT 005 / RW 002 Kel/Desa. Boyaoge , Kec. Tatanga - Kota Palu , Pekerjaan Wiraswasta,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;**
10. Fatimah Almusawa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kalimas Madya 2/21, RT/RW: 002/008, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;**
11. **Wahyuningsih, S.P.d**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dukuh Malang, RT/RW: 003/001, Kelurahn/Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta,  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;**

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11, adalah ahli waris daripada Almarhum Abdullah Bin Umar Alhasni, selanjutnya PENGGUGAT 1 sampai dengan PENGGUGAT 11 disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT

Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :

Nama	: <b>SARAH SERENA, S.H., M.H.</b>
NIK	: 3275025205760036
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta/12 Mei 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pendidikan	: S-2 (Strata Dua)
Kewarganaegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Advokat Pada Kantor Hukum Law Office Sarah & Partners
Alamat	: Dusun Jatiombo, Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto
Alamat Email Ecourt	: <a href="mailto:eryakamal@gmail.com">eryakamal@gmail.com</a>
Password	: mojokerto19

Guna mewakili dan bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa secara sendiri selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **15 Juli 2021**.

# LAW OFFICE SARAH AND PARTNERS

---

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PARA  
**PENGGUGAT**

Dengan ini, hendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **PT. PELABUHAN INDONESIA III ( Persero ),** berkedudukan hukum di Jl. Perak Timur No.610, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya Jawa Timur 60165, yang dalam perkara ini diwakili oleh Boy Robyanto, Selaku Direktur Umum Pada PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**
2. **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA,** berkedudukan hukum di Jl. Taman Surya No. 1 , Kota Surabaya, yang dalam perkara ini di wakili oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya pada Pemerintahan Kotamadya Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

Adapun alasan PARA PENGGUGAT mengajukan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini adalah sebagai berikut :

## I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa merujuk kepada Pandangan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) yang menyatakan sebagai berikut : penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim", maka sehubungan PARA PENGGUGAT merasa "Kepentingan Hukumnya" dilanggar oleh TERGUGAT bersama sama dengan TURUT TERGUGAT, maka TERGUGAT pun mengajukan gugatan ini ke **Pengadilan Negeri Surabaya**;
2. Bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT (Legal Standing) dalam gugatan perkara ini merujuk kepada ketentuan **Pasal 9 ayat 2** Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut : *"Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.*
3. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Para Ahli Waris daripada Almarhum Alhasni Abdullah Bin Umar. Halmana semasa hidupnya, Almarhum Alhasni Abdullah Bin Umar merupakan pemilik bangunan yang terletak di Jalan Ikan Dorang Nomor 3, Surabaya sejak tahun 1970 berdasarkan Akta Otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Akta Perjanjian Djual Beli Nomor 53 tertanggal 12 Juni 1970 jo Akta Perjanjian djual Beli Nomor 39 tertanggal 14 Oktober 1970. Bangunan tersebut berdiri diatas tanah Negara;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris daripada Almarhum Alhasni Abdullah Bin Umar, berhak atas tanah dimana bangunan milik orang tua PARA PENGGUGAT berada yakni di Jalan Ikan Dorang No.3, Kota Surabaya dengan merujuk kepada Ketentuan sebagai berikut dibawah ini :

**(1) Pasal 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

*"Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk lewat waktu, dapatlah seseorang menambah waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa dari siapa ia telah memperoleh barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban."*

**(2) Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"

Halmana dengan merujuk kepada **kedua Pasal** tersebut diatas, maka secara terang dan nyata, PARA PENGGUGAT selaku ahli waris daripada Alhasni Abdullah Bin Umar **memiliki kedudukan** sebagai **PENGGUGAT** dalam **perkara ini**;

5. Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas, **dipertegas** dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk."
6. Bahwa gugatan ini sendiri timbul karena perbuatan TERGUGAT selaku badan hukum perdata yang mana perbuatan tersebut bersifat **ultra vires** yang mengandung unsur **melawan hukum** dengan cara membuat surat **Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah** Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan **Perak Barat** Kecamatan **Krembangan** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor

591.1/1278/411.12/1987 , tanggal 30 Juni 1987 yang dibuat oleh TERGUGAT yang berakibat terbitnya SK HPL Nomor : 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama TURUT TERGUGAT. Halmana perjanjian tersebut tidaklah sah secara hukum karena dilakukan secara **melawan hukum** yakni **tanpa** adanya "izin" ataupun "**pelimpahaan**" daripada yang "**berhak**" yakni Negara;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut, secara **tidak langsung** telah membuat PARA PENGGUGAT kehilangan **kesempatan** untuk **memperoleh hak atas tanah negara**, serta *dirugikan* secara **individual**. Halmana perbuatan tersebut telah **menghilangkan hak** PARA PENGGUGAT guna memperoleh **akses** untuk **Proses Pendaftaran dan Pengurusan Hak Kepemilikan** PARA PENGGUGAT **atas tanah negara** yang **telah dikuasai** oleh PARA PENGGUGAT sebelum SK HPL Nomor : 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama TURUT TERGUGAT terbit dan jauh sebelum adanya Perjanjian tersebut **dilakukan**;
8. Bahwa dengan demikian, secara **terang** dan **jelas hak asasi** PARA PENGGUGAT untuk **memperoleh hak atas tanah** telah **terlanggar** oleh TERGUGAT bersama sama dengan TURUT TERGUGAT;
9. Bahwa **hak atas atas tanah merupakan bagian daripada hak hidup sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berbunyi sebagai berikut :  
*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."*
10. Bahwa manusia **memerlukan tanah** untuk bisa "**hidup**" sebagai "**layak**" nya seorang **manusia**; Sehingga dengan demikian, "**hak untuk hidup**" dan "**hak atas tanah**" adalah satu **kesatuan** yg **tidak dapat** dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka pelanggaran hak atas tanah sama artinya dengan pelanggaran **hak atas hidup**. Dengan demikian, merujuk kepada **Pasal 7 ayat 1** Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan dan **kepentingan hukum** sebagai PENGGUGAT untuk **mengajukan gugatan** ini.

## II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Para Ahli Waris daripada Almarhum Alhasni Abdullah Bin Umar. Halmana semasa hidupnya, Almarhum Alhasni Abdullah Bin Umar, merupakan pemilik bangunan yang terletak di **Jalan Ikan Dorang Nomor 3, Surabaya** sejak tahun **1970** berdasarkan **Akta Otentik** sebagaimana **diatur** di dalam Pasal **1868** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni **Akta Perjanjian Djual Beli Nomor 53 tertanggal 12 Juni 1970** jo **Akta Perjanjian djual Beli Nomor 39 tertanggal 14 Oktober 1970**. Bangunan tersebut berdiri diatas tanah **Negara**;
2. Bahwa awalnya tanah **Negara** dimana bangunan milik orang tua PARA PENGGUGAT yakni Almarhum Alhasni Abdullah bin Umar, yang terletak di Jalan Ikan Dorang Nomor 3 , Surabaya merupakan **tanah negara** yang dikelola oleh Departemen Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan Nomor **191 Tahun 1969** dan Nomor **SK. 83/O/1969** Tertanggal **27 Desember 1969**. Halmana pada **Pasal 3** dalam Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tersebut menyatakan sebagai berikut: "Dalam rangka rencana tata guna tanah yang dimaksudkan dalam **Pasal 2**, maka batas-batas lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan tiap pelabuhan **ditunjuk** oleh Menteri Perhubungan, ditetapkan bersama oleh **Menteri Perhubungan** dan **Menteri Dalam Negeri** , setelah mendengar **pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan**;
3. Bahwa kemudian, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan Nomor **191 Tahun 1969** dan Nomor **SK. 83/O/1969** Tertanggal **27 Desember 1969** , dalam **Pasal 8 ayat 2 menyatakan sebagai** berikut : "Tanah yang terletak **dalam** lingkungan kerja pelabuhan yang **batas-batasnya** telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang **lama** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap telah **dikuasai** oleh Departemen Perhubungan dengan hak pengelolaan menurut **Pasal 4** dan **Pasal 5** sampai ditentukan **batas-batas yang baru** menurut ketentuan **Pasal 3** Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan

Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK. 83/0/1969 Tertanggal 27 Desember 1969;

4. Bahwa setelah belasan tahun kemudian, Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Perhubungan, membuat batas-batas yang baru untuk lingkungan kerja pelabuhan melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor : KM. 110/AL.106/Phb.'81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
5. Bahwa di dalam Surat Keputusan Bersama Dua Menteri Tahun 1981 tersebut diatas, diatur pembagian wilayah pengeloalaan sebagai berikut :
  - a) Wilayah **DILUAR** batas lingkungan kerja yang baru, dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, C.q. Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam **Diktum Kedua angka 2** Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor : KM. 110/AL.106/Phb.'81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
  - b) Wilayah **DIDALAM** batas lingkungan kerja yang baru, termasuk daerah pemukiman/tempat tinggal penduduk yang terdapat **didalam** lingkungan kerja yang baru menjadi bagian wilayah yang **dikuasai** oleh TERGUGAT selaku **Badan Penguasa Pelabuhan Tanjung perak, Surabaya** sebagaimana diatur dalam **Diktum Kedua angka 3** dan **Diktum Ketiga Angka 2** Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor : KM. 110/AL.106/Phb.'81 tanggal 29 April 1981 tentang **Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya**.
6. Bahwa lebih lanjut **Diktum Kedua angka 3** dalam Surat Keputusan Bersama tersebut menyatakan bilamana daerah pemukiman/tempat tinggal **penduduk** yang terdapat **di dalam** lingkungan kerja Pelabuhan akan diatur lebih lanjut oleh **Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya** dengan **Badan Penguasa Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya**;
7. Bahwa selang beberapa tahun kemudian, secara tanpa hak, TERGUGAT membuat **Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± 98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krengbangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.1/1278/411.12/1987, tanggal 30 Juni 1987 yang dibuat oleh TERGUGAT yang berakibat terbitnya SK HPL Nomor : 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama TURUT TERGUGAT**;

8. Bahwa **perjanjian** tersebut **melibatkan** seluruh tanah dalam area /pemukiman baik yang berada **DIDALAM** maupun **DILUAR** lingkungan kerja pelabuhan;
9. Bahwa **akibat adanya perjanjian aquo**, PARA PENGGUGAT sebagai PIHAK Ketiga yang **tidak terlibat dalam perjanjian** menjadi **kehilangan kesempatan** untuk **memperoleh hak atas tanah**, yang mana **seharusnya** bisa di **dapatkan** berdasarkan **ketentuan** pada Pasal **1958** jo Pasal **1963** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa merujuk kepada hal tersebut, maka secara terang dan nyata, hak asasi PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur di dalam **Pasal 4** Undang-Undang RI Nomor **39 Tahun 1999** Tentang **Hak Asasi Manusia** jo **Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria** secara terang dan nyata telah **terlanggar** oleh **TERGUGAT** bersama sama dengan **TURUT TERGUGAT**;

## IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### A. Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur Pasal **1365** jo. Pasal **1366** KUHPerdata.

#### **Pasal 1365 KUHPerdata:**

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

#### **Pasal 1366 KUHPerdata:**

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatinya"

2. Bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum** menurut **M.A.Moegni Djodjodirdjo** di dalam bukunya yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum**" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesesuaian ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"

### B. Hak-Hak Asasi Manusia Yang Telah Dilanggar

1. Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) bukan Negara Kekuasaan (Maachtstaat), dimana hal tersebut diatur dengan tegas di dalam **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945** beserta

aman demennya. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri merupakan landasan **kontitusional** dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

2. Bahwa oleh karena, **Undang-Undang Dasar 1945** merupakan landasan **konstitusional** bagi **Negara Republik Indonesia**, maka di dalamnya diatur **hak-hak asasi manusia** bagi warga **Negara Republik Indonesia**, dimana **hak-hak tersebut tidaklah boleh dilanggar oleh siapa pun**;
  
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah bagian dari warga negara Indonesia yang hak-haknya **telah terlanggar** oleh tindakan **ultra vires** daripada TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT yang mana tindakan tersebut secara terang dan jelas **mengandung unsur perbuatan melawan hukum**;
  
4. Bahwa **hak-hak yang dilanggar** sebagaimana dimaksud tersebut antara lain:
  - (1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:  
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
  - (2) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:  
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
  - (3) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:  
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
  - (4) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:  
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun
  
5. Bahwa selain itu **Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)** juga menjamin **hak-hak asasi manusia** ini, antara lain:
  - a. **Pasal 9 UU HAM:**
    - (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
    - (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. **Pasal 11 UU HAM:**

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

c. **Pasal 12 UU HAM:**

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

d. **Pasal 27 UU HAM:**

"Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia."

e. **Pasal 29 UU HAM:**

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

f. **Pasal 30 UU HAM:**

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

g. **Pasal 35 UU HAM:**

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."

h. **Pasal 36 UU HAM:**

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

i. **Pasal 37 UU HAM:**

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara

waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

## C. Kewajiban Dan Tanggungjawab Tergugat

1. Bahwa TERGUGAT selaku Badan Hukum Perdata sebagaimana disebutkan dalam **Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby** Tertanggal 22 Juli 2021 mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang mengatur tentang **hak asasi manusia**;
2. Bahwa bila merujuk kepada **teori hukum murni** yang dipaparkan oleh **Hans Kelsen**, peraturan perundang-undangan mempunyai **kekuatan hukum** yang **mengikat** sejak **tanggal berlakunya** peraturan tersebut;
3. Bahwa berkenaan dengan peralihan hak atas tanah negara, maka TERGUGAT terikat dengan peraturan yang mengaturnya, yakni **Permendagri Nomor 6 Tahun 1972** tentang **Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah**;
4. Bahwa **Pasal 12 ayat 1** Permendagri tersebut secara **terang** dan **jelas** menyatakan bilamana **pemindahan hak pengeloaan** atas tanah **negara** harus **ada izin** daripada **Menteri Dalam Negeri** selaku wakil **Negara**:
5. Bahwa **ternyata peraturan** sebagaimana tersebut diatas, secara **sengaja diabaikan** oleh TERGUGAT dengan cara mengalihkan hak pengelolaan atas tanah negara hanya di dasarkan pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan umum Pelabuhan III Nomor : DIR.III/15/KPTS/KP.12/84 tanggal 12 Juni 1984. Hal ini membuktikan bilamana TERGUGAT telah melanggar ketentuan **Pasal 12 ayat 1** Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang **Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah**;
6. Bahwa selain **melanggar** ketentuan Permendagri tersebut, TERGUGAT juga telah **menyalah gunakan wewenangnya** dengan cara **menggelapkan tanah** dengan **menyerahkannya** kepada TURUT TERGUGAT, yang mana sebenarnya tersebut merupakan **tanah** yang langsung **dikuasai** oleh **Negara** c.q **Menteri Dalam Negeri** berdasarkan pada **Diktum Kedua angka 2** Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 **Tahun 1981** dan Nomor **KM.110/AL.106/Phb.'81** tanggal 29 April 1981 tentang **Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya**, daerah/area pemukiman/tanah **DIUAR** batas kerja lingkungan pelabuhan;
7. Bahwa selain **menggelapkan** tanah yang berada **DILUAR** wilayah kerja baru pelabuhan , TERGUGAT juga **menggelapkan tanah** yang berada di

dalam lingkup wilayah kerja baru pelabuhan. Halmana apabila merujuk kepada **Diktum ketiga angka 2** Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor **93 Tahun 1981** dan Nomor **KM.110/AL.106/Phb.'81** tanggal **29 April 1981** tentang **Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya**, dimana dalam diktum tersebut **disebutkan** bilamana Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja **Pelabuhan diberikan** dengan **Hak Pengelolaan** Kepada Departemen Perhubungan atau **Instansi** yang **ditunjuk** oleh **Menteri Perhubungan**.

8. Bahwa ketentuan adanya **penunjukkan** oleh Menteri Perhubungan sebagaimana dalam **Diktum Ketiga angka 2** Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor **93 Tahun 1981** dan Nomor **KM.110/AL.106/Phb.'81** tanggal **29 April 1981** tentang **Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya** merupakan **penegasan** dari pada **Pasal 5 ayat 2** Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan Nomor **191 Tahun 1969** dan Nomor **SK. 83/0/1969** Tanggal **27 Desember 1969**;
9. Bahwa dengan demikian, **Implementasi** Diktum Kedua angka 3 Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor **93 Tahun 1981** dan Nomor **KM.110/ AL.106/Phb.'81** tanggal **29 April 1981** yang **menyatakan** bahwa : Daerah pemukiman/tempat tinggal penduduk yang terdapat di dalam lingkungan kerja Pelabuhan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan **Badan Pengusaha Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya**, hanya baru dapat dilaksanakan apabila **TERGUGAT** selaku **Badan Pengusaha Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya** telah mendapat **surat PELIMPAHAN** atau **penunjukkan** daripada **Menteri Perhubungan**.
10. Bahwa pada **kenyataannya**, **TERGUGAT** baru memiliki surat **PELIMPAHAN** berupa **SK HPL No. 38/HPL/DA/87** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Pelabuhan III Surabaya** dari **An. Menteri Dalam Negeri / Direktur Jenderal Agraria** pada tanggal **1 Oktober 1987**, sedangkan **Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah** seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan, Kotamadya Surabaya dibuat dan ditanda tangani oleh **TERGUGAT** bersama-sama dengan **TURUT TERGUGAT** pada tanggal **30 Juni 1987**.
11. Bahwa bila **merujuk** kepada fakta tersebut diatas, maka secara terang dan **jelas** perbuatan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang membuat dan **menandatangani** **perjanjian** sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena melanggar ketentuan

daripada **Pasal 2 UU Prp Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya.**

12. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal tersebut diatas, maka jikalau TERGUGAT mau membuat perjanjian atas tanah aquo, **harus terlebih dahulu memperoleh izin atau surat pelimpahan /penunjukkan daripada yang berhak**, yakni Menteri sesuai dengan Ketentuan **Pasal 2 UU Prp Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya**, menyatakan sebagai berikut: "**Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.**"
13. Bahwa namun pada **kenyataan**, perjanjian penyerahan pengelolaan tanah seluas ± 98 HA di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan, Kotamadya Surabaya dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT pada tanggal **30 Juni 1987** hanya di dasarkan pada **Surat Keputusan Direksi Perusahaan umum Pelabuhan III** Nomor : DIR.III/15/KPTS/KP.12/84 tanggal **12 Juni 1984** yang dijadikan **dasar** oleh TERGUGAT untuk **membuat** Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± 98 HA di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Dati II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dibuat oleh TERGUGAT yang berakibat terbitnya **SK HPL** Nomor : **55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama TURUT TERGUGAT**;
14. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, maka secara terang dan nyata, TERGUGAT selaku **Badan Hukum Perdata** telah melakukan **perbuatan melawan hukum** karena **mengalihkan hak atas tanah negara tanpa izin yang berhak**;
15. Bahwa **akibat perbuatan** TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT menderita kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah;
16. Bahwa bila **merujuk** kepada ketentuan **Pasal 1958** dan **Pasal 1963** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **seharusnya** PARA PENGGUGAT **berhak** untuk **memperoleh hak milik atas tanah** yang telah dikuasainya selama puluhan tahun. Halmana **hak** tersebut merupakan **hak asasi manusia** sebagaimana **diatur** di dalam **Pasal 28H ayat (4) UUD 1945** jo **Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia** serta **Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria**;
17. Bahwa **merujuk** kepada **fakta** sebagaimana tersebut diatas, maka **penerbitan dan penandatanganan** Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± 98 HA di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya

Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/ 411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** juga merupakan perbuatan melawan hak asasi manusia, karena secara tidak langsung telah melanggar Hak Asasi PARA PENGGUGAT selaku manusia sekaligus warga Negara Republik Indonesia;

18. Bahwa TERGUGAT sebagai Badan Hukum Perdata seharusnya menyadari **kewajiban hukum** dan **tanggung jawabnya** untuk **menghormati, melindungi, menegakkan HAM**. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya **amanat undang-undang** tetapi bahkan merupakan **amanat konstitusi**.

19. Bahwa oleh karena, penerbitan dan penandatangan perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Dati II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/ 411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** dilakukan oleh **TERGUGAT** selaku **Badan Hukum Perdata** secara **sengaja , maka**

TERGUGAT mempunyai **kewajiban hukum** untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul terhadap diri PARA PENGGUGAT;

## D. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Turut Tergugat

1. Bahwa TURUT TERGUGAT juga memiliki **kewajiban hukum** terkait dengan **perjanjian penyerahan pengelolaan** tersebut, dan tidak dapat **dilepaskan tanggung jawab** tersebut;
2. Bahwa **tanggung jawab** TURUT TERGUGAT adalah **terlibat** sebagai **Pihak dalam perjanjian yang tidak sah** tersebut;
3. Bahwa sebagai **Pihak** yang **terlibat** dalam **perjanjian**, seharusnya TURUT TERGUGAT paham bila perjanjian yang bersifat "**penipuan**" dapat **dibatalkan** secara **hukum** menurut ketentuan dalam **Pasal 1328** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa **perjanjian** tersebut **tidak sah** menurut hukum, karena TERGUGAT selaku **pihak yang membuat perjanjian** telah melakukan perbuatan **ultra vires**, dimana perbuatan tersebut secara terang dan nyata **melanggar** ketentuan daripada **Pasal 12 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972** tentang **Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah**;
5. Bahwa **pasal** sebagaimana **dimaksud** diatas **mengharuskan** adanya **izin** dari **Menteri Dalam Negeri** apabila terjadi **pengalihan hak atas tanah**, termasuk **halnya** dengan tanah **hak pengelolaan**;

6. Bahwa **selain** di dasarkan Pasal 12 dalam Permendagri tersebut, izin daripada Mendagri juga **diperlukan** mengingat **ketentuan** dalam **Diktum kedua angka 2** Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor **93 Tahun 1981** dan Nomor **KM.110/AL.106/Phb.'81** tanggal **29 April 1981** tentang **Batas batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya** menyatakan bilamana daerah/area pemukiman/tanah **DIUAR** batas kerja lingkungan pelabuhan yang baru adalah **merupakan** tanah yang **langsung dikuasai** oleh **Negara c.q Menteri Dalam Negeri**;
7. Bahwa dengan **demikian**, secara **terang** dan **jelas** bilamana TERGUGAT **tidak pernah** untuk **mengalihkan** atas tanah yang berada di area/pemukiman **diluar** pelabuhan **berdasarkan** Diktum sebagaimana maksud diatas, namun nyatanya TERGUGAT dengan **berani mengabaikan** ketentuan tersebut dengan cara membuat **perjanjian penyerahan pengelolaan hak atas tanah seluas ± 98 hektar** sebut bersama sama dengan **TURUT TERGUGAT**;
8. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata TURUT TERGUGAT **ikut bertanggung jawab** atas **kerugian** yang **diderita** oleh PARA PENGGUGAT akibat pembuatan perjanjian penyerahan hak pengelolaan tersebut;
9. Bahwa halmanya **akibat** perbuatan TERGUGAT bersama sama TURUT TERGUGAT, PARA PENGGUGAT **telah kehilangan kesempatan** sebagai **warga negara** untuk **memperoleh hak milik atas tanah**. Padahal hal tersebut **sudah dijamin** di dalam ketentuan **Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya:
10. Bahwa jika merujuk kepada ketentuan Pasal **1958** jo Pasal **1963** KUHPerdata, seharusnya PARA PENGGUGAT berhak untuk memperoleh hak milik atas tanah harta peninggalan almarhum orang tuanya yang terletak di Jalan Ikan Dorang Nomor 3 , Surabaya. Hal ini dikarenakan tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua PARA PENGGUGAT selama lebih daripada **30 (tiga puluh) tahun lamanya**;
11. Bahwa dengan demikian, TURUT TERGUGAT telah dengan sengaja menyalah gunakan kewenangannya dengan bekerjasama dengan TERGUGAT membuat **perjanjian yang tidak sah** menurut hukum, yang mana **akibat** perbuatannya tersebut telah menyebabkan terlanggarannya **hak-hak asasi** PARA PENGGUGAT selaku **warga negara Indonesia** yang seharusnya memiliki **hak atas tanah** sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT juga merupakan Pihak yang turut terlibat dalam Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kotamadya Dati II

Surabaya, Nomor 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.1/1278/411.12/1987, tanggal 30 Juni 1987 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut kacamata hukum, maka TURUT TERGUGAT juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT serta membatalkan perjanjian penyerahan pengelolaan atas tanah tersebut **demi hukum**;

## V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang bersifat **ultra vires** dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak telah **menyerahkan tanah milik negara** tanpa **se-izin** yang **berhak**, telah memberikan kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagai Pihak Ketiga yang berada diluar Perjanjian tersebut :
2. Bahwa kerugian tersebut bukan saja **kerugian** yang **bersifat** materil tetapi juga **immateril** dimana PARA PENGGUGAT menjadi **kehilangan kesempatan** untuk memperoleh **hak milik atas tanah** yang telah dikuasai oleh **keluarganya** secara **turun temurun** sejak tahun 1970;
3. Bahwa selain itu juga, PARA PENGGUGAT juga dirugikan karena harus **membayar restribusi** kepada TURUT TERGUGAT sebagai akibat dari pada perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut;
4. Bahwa kepada penarikan restribusi oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud tersebut maka total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**;
5. Bahwa mengacu kepada fakta sebagaimana tersebut diatas, terlihat secara terang dan jelas bilamana sebagai akibat adanya penerbitan dan penanda tanganan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± 98 HA di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Dati II Surabaya, Nomor 12/JS.185/SP/87, secara langsung ataupun tidak langsung, telah membuat PARA PENGGUGAT menderita kerugian baik material maupun immaterial. Oleh karena itu, baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT berkewajiban hukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti akibat kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT tersebut.

## VI. KESIMPULAN :

1. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Badan Hukum Perdata

berkenaan dengan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Dati II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/ 411.12/1987**, tanggal 30 Juni 1987, maka secara terang dan nyata **Pengadilan Negeri Surabaya memiliki kompetensi absolut (mutlak)** untuk memeriksa dan mengadili gugatan terkait perkara ini. Oleh karena itu, **PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat, agar kiranya** Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menerima gugatan PARA PENGGUGAT ini;

2. Bahwa oleh karena, fakta-fakta dalam gugatan ini membuktikan bilamana perbuatan TERGUGAT selaku Badan Hukum Perdata bersama sama dengan TURUT TERGUGAT yang telah membuat dan mendantangani Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Dati II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/ 411.12/1987**, tanggal 30 Juni 1987, baik secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT selaku warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak asasi manusia, yakni hak atas tanah. Oleh karena itu, maka secara terang dan jelas, perbuatan TERGUGAT bersama sama dengan TERGUGAT tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar hal tersebut, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT yang melakukan tindakan **ultra vires** (diluar kewenangan) merupakan tindakan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
4. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT merupakan **perbuatan melawan hukum**, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menyatakan **Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah** Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya

Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/ 411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan terbitnya **SK HPL Nomor 55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan** Atas Nama TURUT TERGUGAT adalah **tidak sah** dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa oleh karena perjanjian **Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah** Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krengbangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan terbitnya **SK HPL Nomor : 55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan** Atas Nama TURUT TERGUGAT adalah **tidak sah** dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, maka bersama ini **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk **memerintahkan** kepada TERGUGAT dan **TURUT TERGUGAT** untuk **membatalkan perjanjian penyerahan** Tanah Seluas ± **98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krengbangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan terbitnya **SK HPL Nomor 55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan** Atas Nama **TURUT TERGUGAT**;
6. Bahwa oleh karena akibat perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT bersama-sama TURUT TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT selama puluhan tahun, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perera agar kiranya berkenan untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk **secara tanggung renteng membayar ganti kerugian** kepada **PARA PENGGUGAT** baik **materil** maupun **immateril** yang nilainya sebesar **Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul, akibat ulah perbuatan baik dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara

## VII. PETITUM

# LAW OFFICE SARAH AND PARTNERS

---

Berdasarkan uraian diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Perjanjian antara TERGUGAT dengan TERGUGAT berupa **Penyerahan Pengelolaan Tanah Seluas ± 98 HA** di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan terbitnya **SK HPL Nomor : 55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan** Atas Nama **TURUT TERGUGAT** adalah **tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat**;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan perjanjian penyerahan Tanah Seluas ± 98 HA di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor **12/JS.185/SP/87** dan Nomor **591.1/1278/411.12/1987**, tanggal **30 Juni 1987** yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan terbitnya **SK HPL Nomor 55/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** Tentang **Pemberian Hak Pengelolaan** Atas Nama **TURUT TERGUGAT**;
5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik materil maupun immateril yang nilainya sebesar **Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

**Atau :**

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini disampaikan oleh PARA PENGGUGAT selaku PARA AHLI WARIS ALMARHUM AIHASNI ABDULLAH BIN UMAR. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini..

# LAW OFFICE SARAH AND PARTNERS

---

**Surabaya, 6 Agustus 2021**  
Hormat Kami  
**Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT**

**Sarah Serena, S.H.,M.H**

Dicetak Melalui SIPP PN\_Sby\_2021\_Pdt.G\_770\_petitum.docx